

## **BAB III**

### **Masyarakat Ekonomi ASEAN**

Negara-negara ASEAN terdiri dari negara berkembang dan negara industri baru. Negara berkembang bertumpu pada hasil pertanian, kehutanan, kelautan, dan usaha mikro kecil dan menengah sebagai pondasi perekonomiannya. Sedangkan negara-negara industri baru di Asia Tenggara meskipun mengandalkan sektor industri manufaktur dan perdagangannya, hingga kini masih ditopang oleh sektor pertanian dan pemanfaatan sumber daya alamnya.

Dengan hilangnya hambatan tarif sebagaimana yang telah tercantum pada Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) dan upaya penghilangan hambatan non-tarif melalui peningkatan Protocol on Notification Procedure dan Non-Tariff Measures (NTMs), maka rencana pemerintah ASEAN dalam mencapai arus komoditi impor yang bebas dan mewujudkan pasar tunggal serta sentra produksi tunggal di regional ASEAN idealnya akan terwujud. ASEAN memiliki mitra dagang yang strategis dan mencakup global, seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sebagainya.

ASEAN Leaders Summit di Kuala Lumpur pada bulan Desember 1997 menentukan

ASEAN menjadi sebuah kawasan yang stabil, makmur, dan memiliki

kemampuan bersaing yang tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi (ASEAN Vision 2020).

Di dalam Bali Summit pada bulan Oktober 2003, Para pemimpin ASEAN mendeklarasikan ASEAN Economic Community (AEC) akan menjadi goal integrasi ekonomi regional pada tahun 2020 (Bali Concord II).

Sebagai tambahan terhadap AEC, ASEAN Security Community, dan ASEAN Socio-Cultural Community, adalah dua pilar integral lain dalam pelaksanaan ASEAN Community. Ketiga pilar tersebut diharapkan untuk dapat bekerja dengan harmonis dalam mewujudkan ASEAN Community 2020.

Selanjutnya, ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, membuahkan persetujuan untuk mengembangkan "suatu blueprint yang tunggal dan koheren untuk meningkatkan AEC dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik dan elemen-elemen AEC tahun 2015 konsisten dengan Bali Concord II dengan target-target yang jelas dan umeline-timeline untuk mengimplementasikan berbagai peraturan-peraturan juga berbagai fleksibilitas yang akan disetujui untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan seluruh negara anggota ASEAN."

Pada ASEAN Summit ke-12 bulan Januari 2007, para pemimpin mengafirmasi komitmen mereka secara tegas untuk mengakselerasi terbentuknya ASEAN Community 2015 sebagaimana telah dirancang dalam ASEAN Vision 2020 dan ASEAN Concord II, dan ditandatanganinya Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an



mengimplementasikan beberapa rekomendasi menurut High Level Task Force (HLTF) di Integrasi Ekonomi ASEAN yang tercantum dalam Bali Concord II.<sup>31</sup>

Di waktu yang sama, MEA akan mengarahkan pembagian pembangunan dan mengakselerasi integrasi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam melalui Initiative for ASEAN Integration dan inisiatif-inisiatif regional lainnya. Kerjasama di area lain juga akan digabungkan, seperti pembangunan sumber daya manusia dan capacity building, pengakuan kualifikasi-kualifikasi profesional, konsultasi yang lebih dekat dalam ekonomi makro dan kebijakan-kebijakan finansial, ukuran-ukuran keuangan perdagangan, mempertinggi konektivitas infrastruktur dan komunikasi, pembangunan transaksi elektronik melalui e-ASEAN, mengintegrasikan industri-industri di seluruh area untuk meningkatkan pemberdayaan regional, dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam penyelenggaraan MEA.<sup>32</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dan atas dasar pertimbangan akan pentingnya perdagangan eksternal terhadap ASEAN dan kebutuhan akan ASEAN Community sebagai satu kesatuan untuk tetap outward-looking, MEA mempertimbangkan beberapa karakteristik kunci sebagai berikut: (a) Pasar tunggal dan basis produksi, (b) Kawasan ekonomi yang memiliki daya saing tinggi, (c) Sebuah kawasan yang memiliki

(d) Sebuah kawasan yang sepenuhnya terbuka

dalam ekonomi global. Karakteristik-karakteristik tersebut bersifat berhubungan satu dengan yang lain dan saling mendukung.<sup>33</sup>

## **B. Arus Bebas Berbagai Komoditas**

Arus bebas komoditas (free flow of goods) adalah sebuah elemen atau salah satu turunan dari salah satu karakteristik kunci MEA, yaitu terwujudnya pasar tunggal dan basis produksi. Pasar tunggal bagi barang dan jasa juga akan memudahkan pengembangan jaringan-jaringan produksi di kawasan Asia Tenggara dan meningkatkan kapasitas ASEAN untuk menjalankan peran sebagai sebuah sentra produksi global atau sebagai bagian dari jaringan suplai berantai (supply chain).<sup>34</sup>

Melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN telah mencapai progress yang signifikan dalam hal penghapusan tarif. Namun, arus bebas komoditas barang akan membutuhkan tidak hanya nol tarif tetapi penghapusan hambatan non-tarif juga. Sebagai tambahan, komponen utama lain yang mempermudah arus bebas komoditas adalah ukuran-ukuran fasilitas perdagangan seperti integrasi prosedur bea cukai, mendirikan ASEAN Single Window, melanjutkan peningkatan Common Effective Preferential Tariffs (CEPT) Rules of Origin termasuk prosedur sertifikasi operasionalnya, dan mewujudkan harmoni berbagai standar dan prosedur-prosedur yang disesuaikan.

Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)

komprehensif dalam merealisasikan arus bebas komoditas dan dapat digunakan untuk kebutuhan ASEAN untuk mengakselerasi integrasi ekonomi hingga 2015 mendatang.

Adapun berbagai komoditas yang mendapat hak arus bebas adalah seluruh komoditas ekspor dan impor intra ASEAN melalui bea dan cukai negara-negara ASEAN kecuali Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar yang baru dapat menerapkan sistem tersebut pada tahun 2018. Meskipun demikian, beberapa komoditas sensitif seperti beras, gula, jagung, dan alkohol mendapat pengecualian untuk tidak diikutsertakan berdasarkan hasil SEOM Meeting dan AEMM bulan Juli dan Agustus 2014 silam.

## **1. Penghapusan Hambatan Tarif**

Mengenai penghapusan tarif, tarif terhadap seluruh komoditas intra-ASEAN akan dihapus sesuai dengan persetujuan yang telah terjadwal dan komitmen yang dirancang dalam CEPT-AFTA Agreement dan perjanjian atau protokol lain yang relevan.

Langkah-langkah untuk merealisasikan penghapusan tarif dengan cara:

(1) Menghapus bea impor seluruh produk, kecuali yang dinyatakan dalam Sensitive and Highly Sensitive Lists tahun 2010 bagi ASEAN-6 dan untuk tahun 2015, dengan fleksibilitas untuk beberapa produk sensitif pada tahun 2018, untuk CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) sesuai dengan ketentuan dalam Protocol to Amend the CEPT Agreement for the Elimination of Import Duties. (2) Menghapus bea impor untuk produk dalam Priority Integration Sectors tahun 2007 untuk ASEAN-6 dan 2012 untuk CLMV sesuai dengan ketentuan dalam ASEAN Framework (Amendment) Agreement for the

Sensitive List (SL) ke CEPT Scheme dan mengurangi tarif komoditas tersebut menjadi 0-5% terhitung 1 Januari 2010 untuk ASEAN-6, 1 Januari 2013 untuk Vietnam, 1 Januari 2015 untuk Republik Demokratik Rakyat Laos dan Myanmar, dan 1 Januari 2017 untuk Kamboja, sesuai dengan ketentuan dalam Protocol on Special Arrangements for Sensitive and Highly Sensitive Products. (4) Tahap sinkronisasi daftar produk di General Exception List untuk disesuaikan dengan CEPT Agreement.<sup>35</sup>

## **2. Penghapusan Hambatan Non-Tarif**

ASEAN telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam liberalisasi tarif. Fokus utama ASEAN menuju 2015 akan ditempatkan di penghapusan penuh terhadap hambatan non-tarif. Langkah-langkah realisasinya adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan transparansi secara terus-menerus terhadap Protocol on Notification Procedure dan merancang Surveillance Mechanism yang efektif. (2) Menerima sepenuhnya komitmen penghapusan NTBs. (3) Menghapus seluruh NTBs tahun 2010 untuk ASEAN-5, pada tahun 2012 untuk Filipina, dan tahun 2015 dengan fleksibilitas hingga tahun 2018 untuk CLMV, sesuai dengan penghapusan Work Programme on Non-Tariff Barriers (NTBs) yang disetujui. (4) Meningkatkan transparansi Non-Tariff Measures (NTMs). (5) Bekerja

### **C. Posisi Indonesia Dalam ASEAN Economic Meeting**

Indonesia adalah salah satu negara pendiri ASEAN dan memiliki banyak potensi baik di sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Indonesia juga memiliki letak yang strategis dan GDP yang besar, terbukti masuknya Indonesia dalam G-20. Selain itu, Indonesia yang secara konsisten menganut politik luar negeri bebas aktif dan berhasilnya penerapan demokrasi membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang discgani dan diprediksi menjadi negara besar dalam jangka waktu beberapa dekade mendatang. Indonesia juga memiliki iklim pasar yang kondusif yang kemudian menarik minat investor maupun importir. Sehingga, Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi baik dalam organisasi multilateral maupun regional, terutama ASEAN.

ASEAN Economic Ministers (AEM) Meeting adalah sidang para menteri ekonomi untuk meneruskan kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dua kali setahun. Dalam AEM ke-46 di Myanmar, para menteri ekonomi dan perdagangan se-ASEAN menyatakan bahwa berdasarkan pembaruan terkini ASEAN telah mengimplementasikan 82,1% dari 229 elemen kunci AEC yang ditargetkan untuk selesai sejak tahun 2013. Hal ini sejalan dengan agenda Phnom Penh tahun 2012 tentang ASEAN Community Building untuk mencapai hasil integrasi AEC pada tahun 2015.<sup>37</sup>



Untuk beras dan gula sebagai komoditas yang sensitif tidak hanya bagi Indonesia namun juga bagi negara ASEAN lain yang memiliki concern yang sama seperti Malaysia dan Filipina, maka Protocol To Provide Special Consideration For Rice And Sugar disahkan pada bulan Agustus 2007 di Makati City, Filipina. Dalam Artikel 2, disebutkan bahwa protckol ini akan diteruskan oleh ASEAN Secretariat menuju Senior Economic Officials Meeting (SEOM) dan Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA (CCCA).<sup>38</sup>

Keputusan SEOM ini membutuhkan konsensus antara seluruh anggota ASEAN. Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Bahrul Chairi, negara lain telah sepakat dengan Indonesia untuk tidak meliberalisasi beras dan gula, hanya Thailand yang membutuhkan waktu untuk kemudian melunak dan mau bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Langkah Thailand yang pada awalnya menginginkan tarif nol persen terhadap komoditas impor beras dan gula akhirnya melunak dengan pemberlakuan tarif impor terhadap komoditas tersebut sebesar 20% dari sebelumnya yaitu dalam kisaran 30%.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Protocol to Provide Special Consideration for Rice and Sugar, 2007. ASEAN Secretariat, Jakarta Hal. 3

<sup>39</sup> Tempo 2014. Nasib Baa Masuk Beras Tunggu Menteri Thailand. [m.tempo.co/read/news](http://m.tempo.co/read/news) diakses